
PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR), DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2017-2021 (STUDI KASUS 34 PROVINSI DI INDONESIA)

Novia Rahmawati¹, Panji Kusuma Prasetyanto², Fitrah Sari Islami³
^{1,2,3}Ekonomi Pembangunan, Universitas Tidar, Indonesia

¹noviarah321@gmail.com

*²panjikusuma@untidar.ac.id

³fitrasarislami@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the Human Development Index (HDI), Regional Minimum Wage, and Open Unemployment Rate on the Number of Poor Populations in 34 Provinces in Indonesia in 2017-2021. The data used in this study are secondary data obtained from Centra Bureau of Statistics (BPS). The technique used in this research is panel data regression analysis through the E-views 10 program. The results show that the Fixed Effect Model (FEM) is the most appropriate panel data regression model. Based on the simultaneous test, the Human Development Index (IPM), Regional Minimum Wage, and the Open Unemployment Rate affect the Number of Poor Populations. Based on the partial test, the Human Development Index (HDI) has a negative and significant effect on the Number of Poor Populations, while the Regional Minimum Wage (UMR), and the Open Unemployment Rate have a positive and significant impact on the Number of Poor People in 34 Provinces in Indonesia in 2017-2021.

Keywords: *HDI*¹, *Minimum Wage*², *Unemployment*³, *Number Of Poor People*⁴

PENDAHULUAN

Sebagai indikator keberhasilan ekonomi fenomena kemiskinan tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Agenda pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2012 telah menetapkan target yang diaplikasikan secara universal. Baik dalam lingkup internasional, nasional, dan bahkan regional. Hal ini menuntut adanya kebijakan dalam berbagai sektor dalam mewujudkan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dalam formulasi tujuan dan target utama, pengentasan kemiskinan menempati urutan pertama. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang terutama negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sedang berkembang dan memiliki jumlah penduduk tertinggi di ASEAN yaitu 267 juta pada tahun 2019 dan juga

terbanyak ke empat di dunia BPS (2020). Tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol merupakan karakteristik yang terjadi di negara-negara berkembang yang dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan sendiri termasuk kedalam tingkat masalah yang kompleks, dimana banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan seperti Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional, Pengangguran, Pendidikan, Kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, serta lokasi lingkungan (Islami, 2016).

Menurut World Bank (2012), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan.

Indonesia sendiri memiliki 34 Provinsi dimana setiap Provinsi memiliki masalah masing-masing, terutama kemiskinan, hampir seluruh Provinsi menyumbangkan angka dengan jumlah yang berbeda beda untuk penduduk miskin. Hal ini tentu tidak luput dari pengawasan pemerintah pusat untuk menuntaskan atau menurunkan angka tersebut. Berbagai upaya pemerintah dalam menangani masalah ini dapat diketahui dari banyaknya pembukaan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran yang menjadi salah satu faktor pendorong angka kemiskinan tersebut.

Tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan dampak terhadap perekonomian di seluruh negara di dunia terutama Indonesia, sehingga aktivitas ekonomi terganggu dan berimbas pada pengurangan jumlah pekerja, pemutusan hubungan kerja pada sektor-sektor yang paling terdampak pandemi tersebut yang kemudian menimbulkan permasalahan baru seperti penambahan jumlah penduduk miskin akibat adanya ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat tidak adanya pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja akan mendorong pembangunan ekonomi dan berdampak positif bagi masyarakat

Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran. Dilihat dari permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, maka dari itu diperlukan tindakan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan pasar tenaga kerja adalah dengan memperbaiki sistem pengupahan melalui upah minimum. Selain upah ada beberapa hal yang mendapat perhatian dari pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yaitu kualitas sumber daya manusia yang ada melalui penilaian berdasar Indeks Pembangunan Manusia. Menurut teori lingkaran kemiskinan yang di kemukakan Myrdal dalam Damanduri (2010), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan yaitu kesehatan, pendidikan, pendapatan (upah), dan kualitas manusia itu sendiri.

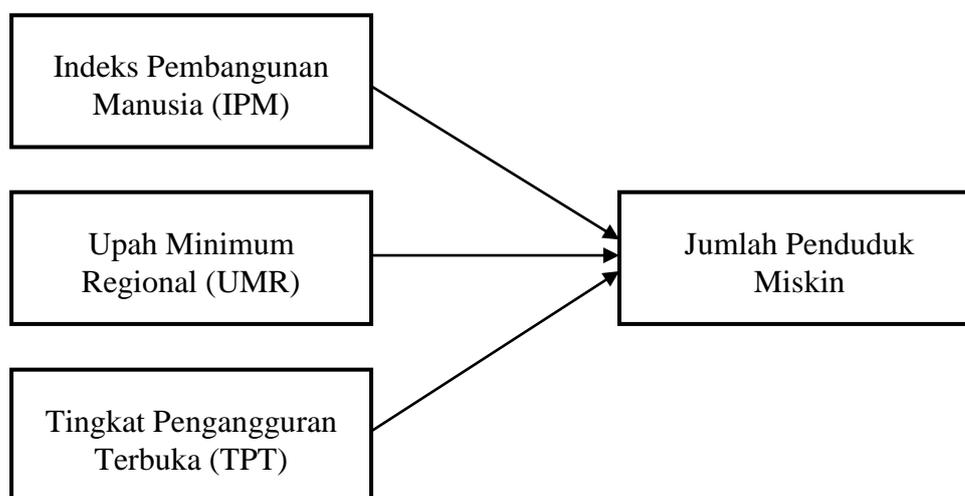
TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu pada teori lingkaran kemiskinan. Menurut Meier dan Baldwin (1960) mendeskripsikan bahwa akan ada jerat kemiskinan yang muncul dari keterkaitan dan saling berpengaruh antara keadaan penduduk yang miskin dengan potensi alam yang ada dan belum bisa dikembangkan, hal ini lebih dikenal dengan nama teori lingkaran perangkap kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). Menurut Nurkse bentuk lingkaran kemiskinan yang ikut andil dalam menghambat kinerja tingkat pembangunan terutama di negara yang sedang berkembang terbagi menjadi dua segi yaitu dari penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), (Setiawan, 2021).

Gunnar Myrdall mempunyai teori lingkaran kemiskinan yang berbanding terbalik dengan milik Nurkse. Myrdall menjelaskan permasalahan modal bukan penyebab utama dari adanya kemiskinan yang utama, tapi disebabkan dari tingkat kesehatan seperti gizi yang buruk, tingkat pendidikan, dan dari pengaruh kebutuhan dasar yang lain seperti pada gambar 1. Menurut Myrdall keadaan penduduk yang miskin dimulai dari penghasilan penduduk yang kecil sehingga berpengaruh pada konsumsi yang diterima kemudian menyebabkan kualitas gizi yang buruk, dan seterusnya mengakibatkan kualitas kesehatan menjadi buruk juga. Kesehatan penduduk yang buruk tentu akan berakibat pada rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan penghasilan yang diterima juga kecil dan alhasil terciptalah kemiskinan. Pendapat dari Myrdall ini pun diadaptasi oleh organisasi buruh

internasional ILO (*International Labour Organization*) dalam mengatasi persoalan kemiskinan terutama di negara yang sedang berkembang, yaitu dengan melahirkan kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need strategy*).

Kemiskinan memiliki pengertian merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di bawah garis kemiskinan baik dari segi pangan maupun non pangan. Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indeks yang merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara representatif dan terukur. Dalam penelitian ini menggunakan Upah Minimum Regional atau Upah Minimum Provinsi merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh dalam bentuk uang menurut persetujuan atau peraturan perundangan daerah yang berlaku. Upah Minimum Regional dinyatakan dalam juta rupiah. Dan terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah presentase jumlah pengangguran terhadap pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021 dan dinyatakan dalam satuan persen. Adapun kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik penarikan data dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan sampel sebanyak 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2017-2021. Teknik pengumpulan data menggunakan studi Pustaka dan data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel merupakan analisis data yang menggabungkan data *cross section* dengan data *time series* dan untuk mengolah data menggunakan *software Eviews 10*. Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai hasil penelitian ini dan dalam menguji hipotesis sebagai jawaban sementara untuk pemecah masalah yang ditemukan, maka dapat dilihat melalui persamaan fungsi sebagai berikut :

$$\sqrt{JPM} = f(IPM, UMR, TPT) \tag{1}$$

Berdasarkan fungsi (1) maka keterkaitan variabel pada fungsi tersebut dapat dibentuk persamaan sebagai berikut :

$$\sqrt{JPM_{it}} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 UMR_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \varepsilon_{it} \tag{2}$$

Dimana :

- JPM : Jumlah Penduduk Miskin
- IPM : Indeks Pembangunan Manusia
- UMR : Upah Minimum Regional
- TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1 - \beta_4$: Koefisien dari IPM, UMR dan TPT
- ε : *Error term*
- I : *Cross section*
- T : *Time series*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Model Terbaik

Pengujian model terbaik dilakukan untuk menentukan model estimasi yang tepat dan cocok digunakan melalui tiga mengujian yakni uji chow, uji hausman dan uji langrange multiplier.

Uji Chow

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3609.452502	(34,137)	0.0000
Cross-section Chi-square	1189.791173	34	0.0000

Sumber: Olahan data menggunakan Eviews-10

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan hasil uji chow dengan nilai probabilitas chi-square sebesar 0.0000 kurang dari tingkat signifikansi 5% atau 0.05. Sehingga dalam hal ini menyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model yang terpilih adalah *fixed effect model*.

Uji Hausman

Uji hausman adalah uji untuk menentukan model terbaik antara *model fixed effect model* atau *random effect model*. Apabila besarnya probabilitas *cross-section random* lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0,05 artinya *fixed effect model* adalah model yang tepat digunakan. Apabila besarnya nilai probabilitas *cross-section random* lebih besar dari taraf signifikansi 5%, *random effect model* adalah model yang terbaik dipilih.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.277272	3	0.0026

Sumber: Olahan data menggunakan Eviews-10

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan hasil dari uji hausman bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0000 kurang dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Artinya hal ini menyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti model terbaik untuk digunakan dalam penelitian adalah *fixed effect model*.

Setelah dilakukan pengujian pada model uji chow dan uji hausman menunjukkan bahwa *fixed effect model* terpilih sebagai model yang terbaik digunakan dalam penelitian ini jadi uji LM tidak perlu dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan tiga variable independen yakni indeks pembangunan manusia, upah minimum regional, dan tingkat pengangguran terbuka sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin. Uji regresi data panel menggunakan *fixed effect model* yang dilakukan dengan alat bantu Eviews-10. Hasil uji *fixed effect model* sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.498651	0.191265	13.06385	0.0000
Log_IPM	-0.008825	0.002896	-3.047718	0.0028
Log_UMR	0.109969	0.032755	3.357345	0.0010
Log_TPT	0.017289	0.001943	8.897469	0.0000

Sumber: Olahan data menggunakan Eviews-10

Hasil Estimasi Akhir

Pada hasil estimasi sebelumnya, menunjukkan bahwa model regresi data panel yang terbaik digunakan adalah *fixed effect model*.

Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F

F-statistic	4300.798	Durbin-Watson stat	1.410417
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Olahan data menggunakan Eviews-10

Berdasarkan hasil regresi *fixed effect model* yang didapatkan nilai F-tabel didapatkan dengan menghitung persamaan $\alpha - 5\% : df (k-1; n-k) \alpha = 0.05; df = (4-1; 175-4) = (3, 171)$ nilai F-hitung lebih besar apabila dibandingkan dengan F-tabel yakni $4300.798 > 3,171$ berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel IPM, UMR, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variabel terikat (dependen).

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.999140
Adjusted R-squared	0.998907

Sumber: Olahan data menggunakan Eviews-10

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R-squared sebesar 0.998907 (99,98%) yang berarti bahwa variabel IPM, UMR, dan Tingkat Pengangguran Terbuka mampu menjelaskan variabel Jumlah Penduduk Miskin sebesar 99,98%. Sementara sisanya 0,02% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel bebas dalam penelitian ini.

Uji t

Tabel 5. Hasil uji t-statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.498651	0.191265	13.06385	0.0000
Log_IPM	-0.008825	0.002896	-3.047718	0.0028
Log_UMR	0.109969	0.032755	3.357345	0.0010
Log_TPT	0.017289	0.001943	8.897469	0.0000

Sumber : Olahan data menggunakan Eviews-10

B

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa hasil regresi data panel diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\sqrt{JPM}_{it} = 2.498651 - 0.008825IPM_{it} + 0.109969UMR_{it} + 0.017289TPT_{it} \quad (3)$$

Keterangan :

JPM : Jumlah Penduduk Miskin

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

UMR : Upah Minimum Regional

TPT : Terbuka Pengangguran Terbuka

i : *Cross section*

t : *Time series*

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menggunakan metode *fixed effect model* (FEM) menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai koefisien sebesar -0.008825, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara indeks pembangunan manusia dengan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa setiap kenaikan indeks pembangunan manusia sebesar 1%, maka jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0.008825%. Sedangkan nilai probabilitas yang didapatkan sebesar 0,0028, yang artinya lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05 artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis sebelumnya, bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan yang artinya semakin tinggi IPM maka semakin menurun jumlah penduduk miskin. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syuhada (2019) dan Prasetyoningrum (2018) yang menunjukkan menurunnya angka kemiskinan, saat IPM naik akan meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Kualitas SDM yang baik tentu akan memiliki nilai untuk memperoleh gaji yang tinggi. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat itu sendiri akan meningkat, sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya kemiskinan.

Sementara itu, upah Minimum Regional (UMR) memiliki nilai koefisien sebesar 0.109969. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara upah

minimum regional dengan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa setiap kenaikan antara upah minimum regional sebesar 1%, maka jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 0.109969%. Sedangkan nilai probabilitas yang didapatkan sebesar 0,0010 yang artinya lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05 artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa Upah Minimum Regional berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021. Hal ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya, bahwa upah minimum regional berpengaruh positif dan signifikan yang artinya semakin tinggi UMR maka semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Setiawan (2021) yang menyatakan UMR akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kemiskinan. Ini terjadi akibat upah yang menurut perusahaan akan dianggap beban, lantaran upah adalah pengeluaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para pekerja sebagai salah satu input produksi. Oleh karena itu apabila upah semakin tinggi maka akan berdampak pada semakin kecilnya perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Maka dari itu upah yang semakin tinggi akan berdampak negatif pada perusahaan, sehingga apabila ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan upah maka *demand* tenaga kerja akan turun.

Berdasarkan teori pasar tenaga kerja dijelaskan bahwa apabila ada kenaikan upah maka akan terjadi penurunan tenaga kerja dan begitupun sebaliknya sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk miskin. Temuan tersebut pun sesuai dengan penelitian dari Gindling dan Terrell (2006) dimana penelitiannya menyebutkan bahwa kebijakan upah yang dibuat pemerintah sehingga timbulnya batasan upah minimum akan membuat peluang lapangan akan menjadi lebih kecil sehingga yang akan terjadi pada jangka panjang menimbulkan semakin maraknya pengangguran serta kemiskinan. Selain dari penelitian diatas, Burkhauser et.al (2000) juga mempunyai tanggapan yang buruk terkait kebijakan upah minimum. Menurutnya pengaruh dari kebijakan tersebut hanya berdampak kecil pada proses pengentasan kemiskinan karena bahkan hanya sebagian kecil masyarakat miskin yang dapat bekerja dan bisa mendapat upah minimum.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori standar neoklasik (*competitive market*) yang menjelaskan bahwa upah minimum menyebabkan dampak negatif terhadap kesempatan kerja (*employment*), terutama untuk tenaga kerja tidak terampil Borjas (2013). Ketika ada peningkatan upah minimum, perusahaan akan lebih memilih untuk mempertahankan tenaga kerja terampil dibandingkan tenaga kerja tidak terampil. Peningkatan upah akan menyebabkan peningkatan penawaran tenaga kerja, namun terjadi penurunan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan sehingga menyebabkan pengangguran dan pada akhirnya meningkatkan kemiskinan Welch, (1973); Brown et al., (1982).

Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki nilai koefisien sebesar 0.017289, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat pengangguran terbuka dengan jumlah penduduk miskin pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa setiap kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1%, maka jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 0.017289%. Dan nilai probabilitas yang didapatkan sebesar 0,0000 berarti lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05 artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021. Hal ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya, bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021. Hal itu menandakan bahwa setiap terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka diiringi dengan kenaikan jumlah penduduk miskin. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang searah antara tingkat pengangguran terbuka dengan jumlah penduduk miskin dimana hasil penelitian memberikan gambaran yang searah atau positif. Pengangguran terbuka menyebabkan semakin meningkatnya ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup karena tidak adanya penghasilan untuk membeli barang-barang kehidupan sehari-hari, dimana kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup dapat digolongkan kedalam penduduk miskin.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2016) yang menyatakan Pengangguran terbuka mempunyai korelasi positif terhadap kemiskinan, jika tingkat pengangguran tinggi di suatu daerah/negara maka tingkat kemiskinan di daerah/negara tersebut akan tinggi dan sebaliknya. Pengangguran merupakan

permasalahan sosial yang menyebabkan seseorang akan mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang diakibatkan oleh pendapatan yang rendah. Lebih jauh lagi, pengangguran yang dialami oleh masyarakat berpendapatan rendah (berada sedikit di atas garis kemiskinan) akan mudah bergeser menjadi kelompok masyarakat miskin, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran akan menambah tingkat kemiskinan.

Hasil dari penelitian ini juga didukung dengan teori ekonomi yang dikemukakan oleh Arsyad dalam Wijayanto (2010) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintahan dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Menurut Marini dan Putri (2019), penduduk yang berusia muda dan menamatkan sekolah tinggi cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk menganggur. Menurut Sukirno dalam Cholili (2014) adapun efek negatif dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji analisis dapat disimpulkan bahwa secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021, sedangkan Upah Minimum Regional (UMR) dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021. Sementara itu, secara simultan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), dan Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021.

KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu masih terdapat hasil penelitian yang tidak sesuai dengan hipotesis. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan *measurement error* pada proses pengujian data sehingga perlu dilakukan pendalaman terkait dengan alat dan metode analisis yang digunakan. Selain itu, dapat juga disebabkan karena kurang tepatnya dalam pemilihan variabel. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode analisis lainnya dan memasukkan lain di luar variabel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Islami, A. (2016). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Tingkat Kemiskinan Periode 2005-2014 (Studi Kasus 10 Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia)*. Sripsi: Program Studi Ekonomi Syariah, FEB, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
- Arifin. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Arsyad, L. (2010). *Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Borjas, G. J. (2013). *Labor Economics Sixth Edition*. New York(US): The McGraw-Hill Companies.
- BPS. (2021a). *Nilai Indeks Pembangunan Manusia 34 Provinsi tahun 2017-2021*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Diakses pada Maret 2022. <https://bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab5>
- BPS. (2021b). *Tingkat Pengangguran Terbuka 34 Provinsi tahun 2017-2021*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Diakses pada Maret 2022. <https://bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab5>
- BPS. (2021c). *Upah Minimum Regional 34 Provinsi tahun 2017-2020*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Diakses pada Maret 2022. <https://bps.go.id/subject/19/upah-buruh.html#subjekViewTab5>
- BPS. (2021d). *Jumlah Penduduk Miskin (per September) 34 Provinsi tahun 2017-2021*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Diakses pada Maret 2022. <https://bps.go.id/subject/23/ketimpangan-dan-kemiskinan.html#subjekViewTab5>
- Burkhauser, R.V., Couch, K.A., Wittenburg, D.C. (2000). *A Reassessment of the New Economics of the Minimum Wage Literature with Monthly Data from the Current Population Survey*. *Journal of Labor Economics*. 18(4):653-680.
- Case, K.E., & Ray, C.F. (2010). *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Cassandra. (2016). *Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia*. Bogor : IPB.

- Chambers. R. (1983). *Rural Deveopment : Putting the Last First*. London : Longman Group Ltd.
- Cholili, F. M. (2014). *Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)*.
- Damanhuri. D. (2010). *Ekonomi Politik dan Pembangunan*. Bogor (ID): IPB Press
- Gindling T, Terrell K. (2010). *Minimum Wages, Globalization, and Poverty in Honduras*. *World Development*, 38(6), 908-918.
- Gindling TH. (2010). *Minimum Wages, Globalization, and Poverty in Honduras*. *World Development*. 38(6):908-918.
- Gindling, T.H. & Terrell. K. (2006). *Minimum Wages and the Welfare of Different Types of Workes in Honduras*. *Working Paper*. University of Maryland.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Upah Minimum*. Nomor 07/ Men/ 2013.
- Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). *Daftar Upah Minimum Regional tahun 2021*. Republik Indonesia.
- Marini, L., & Putri, N. T. (2019). *Peluang Terjadinya Pengangguran Di Provinsi Bengkulu: Seberapa Besar?. Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(2), 70-83.
- Prasetyoningrum, A. K. (2018). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6, 217-240.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun (2003). *Tentang Ketenagakerjaan*. Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Upah
- Welch, F. (1973). *Minimum wage legislation in United States*. *RAND Paper Series*, P-5145. *RAND Corporation*. Diakses 14 Oktober 2017 dari <https://www.rand.org/pubs/papers/P5145.html>.
- Widarjono, A. (2018). *Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. UPP STIM YKPN.
- World Bank, (2007). *Making the New Indonesia Work for the Poor*. Washington, D.C: The World Bank.